

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tugas utama negara di dalam penyelenggaraan Pendidikan Tinggi adalah menjamin mutu Pendidikan Tinggi sehingga kepentingan masyarakat tidak dirugikan. Sedangkan tugas utama negara dalam pengelolaan Perguruan Tinggi adalah untuk menjamin agar otonomi Perguruan Tinggi dapat diwujudkan. Misi utama Pendidikan Tinggi berdasarkan PP RI No. 4 Tahun 2014 adalah mencari, menemukan, menyebarluaskan, dan menjunjung tinggi kebenaran. Agar misi tersebut dapat diwujudkan, maka Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi harus bebas dari pengaruh, tekanan, dan kontaminasi apapun seperti kekuatan politik atau kekuatan ekonomi, sehingga Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dapat dilaksanakan berdasarkan kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Berdasarkan PP RI No. 4 Tahun 2014, Perguruan Tinggi memiliki otonom untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Otonomi dibidang non akademik yang meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan dan sarana prasarana.

Suti (2020) menjelaskan bahwa sistem tata kelola Perguruan Tinggi juga harus memperhatikan prinsip *Good University Governance* (GUG) dalam mengurangi resiko kesalahan dalam pengelolaannya. Dengan ruang lingkup GUG yang meliputi unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan peningkatan kualitas secara terus menerus dilakukan berdasarkan monitoring dan evaluasi. Perwujudan tata kelola Perguruan Tinggi yang diharapkan harus dilakukan secara bertahap, terencana, dan terprogram dengan kerangka waktu yang jelas mulai dari tata kelola penjaminan mutu, tata kelola aspek fungsional termasuk tata kelola keuangan, dan tata kelola informasi dan digitalisasi. Dengan demikian, belajar dari

praktek Perguruan Tinggi kelas dunia, dapat dilakukan dengan memperoleh kiat sukses agar tata kelola perguruan tinggi menjadi lebih berkualitas serta menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap bersaing.

Barang milik negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Dalam pengelolaan BMN dilakukan berdasarkan aturan pemerintah yang berlaku dengan memperhatikan berbagai asas seperti asas fungsional, asas kepastian hukum, asas transparansi, asas akuntabilitas, asas efisiensi dan asas kepastian nilai. Semua hal tersebut sudah diatur dalam undang-undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Sejak disahkan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pemerintah telah mengeluarkan PP RI Nomor 28 Tahun 2020 yang mengatur secara rinci pengelolaan barang milik negara atau daerah (BMN). Proses pengelolaan BMN mencakup beberapa tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran, hingga penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan. Selain itu, proses penatausahaan, pemanfaatan penilaian, penghapusan, pemindah gunaan, pembinaan, pengawasan, pengendalian, hingga pembiayaan dan tuntutan ganti rugi juga merupakan bagian integral dari manajemen BMN. Semua tahapan tersebut dirancang sebagai pedoman umum bagi instansi pemerintah dalam mengelola BMN dengan efisien dan efektif. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam administrasi pemerintahan.

Berdasarkan PP RI No 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, BMN salah satunya berupa barang persediaan. Persediaan menurut PP No 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan. Persediaan merupakan aset yang meliputi: barang habis pakai, barang tidak habis pakai, dan barang bekas. Persediaan berdasarkan sifat pemakaian salah satunya mencakup Barang Habis Pakai (BHP). BHP ialah barang yang di gunakan dalam kegiatan operasional berbentuk perlengkapan yang di gunakan oleh instansi dan faktor penunjang dalam kegiatan operasional (Rezagi Meilano, 2020). Persediaan BHP diantaranya meliputi persediaan alat tulis kantor, persediaan dokumen/administrasi tender, persediaan alat listrik dan elektronik, persediaan perangkat, materai dan penda pos lainnya, persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih, persediaan bahan bakar minyak/gas, persediaan isi tabung pemadam kebakaran dan persediaan isi tabung gas. Berdasarkan laporan persediaan Politeknik Negeri Bengkalis, yang termasuk dalam persediaan BHP yang digunakan Politeknik Negeri Bengkalis meliputi barang konsumsi, bahan untuk pemeliharaan, suku cadang, bahan baku dan persediaan lainnya.

Ruang lingkup pengelolaan Persediaan BHP, sebagaimana diuraikan dalam modul persediaan aplikasi Sakti tahun 2020, mencakup pengelolaan persediaan di Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) sebagai satker induk dan pengelolaan persediaan di Unit Akuntansi Pembantu Kuasa Pengguna Barang (UAPKPB) sebagai satker pembantu. Meskipun partisipasi penuh dari seluruh unsur instansi diperlukan, tuntutan partisipasi penuh dari seluruh unsur instansi dilandasi dengan alasan bahwa kondisi dan dampak terhadap perubahan yang ada di lingkungan instansi, masing-masing diketahui oleh pegawai. Namun dalam praktiknya pengelolaan persediaan sering dihadapkan pada kendala dan hambatan, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permen PANRB RI) Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, kendala-kendala tersebut biasanya terjadi di bagian dokumen-dokumen, *job description*, struktur organisasi, bagan alur (*flowchart*) dan prosedur sistem dari siklus tersebut.

Reformasi Birokrasi di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Permen PANRB RI No. 35 Tahun 2012, bertujuan untuk membentuk profil dan perilaku

aparatur negara yang memiliki integritas, produktivitas, dan bertanggungjawab serta memiliki kemampuan memberikan pelayanan yang prima melalui perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam sistem manajemen pemerintahan. Reformasi Birokrasi mencakup delapan area perubahan utama pada instansi pemerintah di pusat dan daerah, meliputi: organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, *mind set* dan *culture set* aparatur. Pada hakekatnya perubahan ketatalaksanaan diarahkan untuk melakukan penataan tata laksana instansi pemerintah yang efektif dan efisien. Salah satu upaya penataan tata laksana diwujudkan dalam bentuk penyusunan dan implementasi standar-standar operasional yang akan menghasilkan sebuah prosedur, pedoman dan peraturan yang akan mengatur atau mengontrol semua aktivitas operasional instansi yang disebut sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP, sebagai dokumen yang memuat serangkaian intruksi tertulis tentang proses penyelenggaraan administrasi perkantoran, bagaimana (cara) dan kapan (waktu) harus dilakukan, dimana (perusahaan) dan oleh siapa dilakukan (pekerja) dapat memberikan arah, guna peningkatan kinerja material yang dibakukan. Oleh karena itu SOP selalu dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku dan target yang ditentukan, sehingga dokumen SOP selalu ditinjau ulang untuk mengakomodasi dan mengantisipasi dinamika tugas atau pekerjaan. Peningkatan penyusunan serta perbaikan dalam implementasi SOP pada suatu entitas akan meningkatkan kinerja manajerial secara keseluruhan (Anggareni, 2016).

Pengelolaan sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan publik juga menjadi fokus reformasi, dengan tuntutan efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabilitas, dan kesinambungan serta bertanggung jawab terhadap pemeliharaan, penggantian sarana prasarana, dan fasilitas pelayanan publik. Penyelenggara dan Pelaksana wajib melaporkan yang menjadi dasar analisis dan penyusunan daftar kebutuhan untuk pengadaan sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. kondisi dan kebutuhan kepada penyelenggara mengenai kondisi dan kebutuhan sarana prasarana, dan fasilitas pelayanan publik serta pelaksana sesuai dengan tuntutan kebutuhan standar pelayanan. Atas laporan kondisi dan kebutuhan, penyelenggara melakukan analisis

dan menyusun daftar kebutuhan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dan pelaksana. Atas analisis dan daftar kebutuhan, penyelenggara melakukan pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan.

Akuntansi Pemerintahan melakukan perencanaan dalam penyusunan APBN untuk mendukung kegiatan serta strategi pembangunan dalam mencapai ketaatan pada peraturan undang-undang, efektif dan efisien. Mahardini & Miranti (2018) menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan dengan baik agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan mengupayakan pencapaian tujuan organisasi. Tidak adanya SOP di bagian pengadaan barang habis pakai mengakibatkan pegawai yang ada harus menjelaskan secara detail dan berulang-ulang kepada rekan kerja untuk proses dan prosedur dalam pengadaan barang habis pakai yang mengakibatkan sistem pengadaan BHP tidak berjalan sesuai dengan prosedur (Sari, 2020). Dalam konteks pengadaan Persediaan BHP, pentingnya ketepatan perencanaan dan penganggaran dalam pengadaan Persediaan BHP menjadi faktor kunci. Pelaksanaan pengadaan yang bijak diperlukan untuk mengoptimalkan pengelolaan Persediaan BHP. Dewi (2019) menjelaskan bahwa pengadaan dikatakan baik apabila alat dan bahan yang datang sesuai dengan kebutuhan, berkualitas baik, aman dalam penggunaan, dan mudah disimpan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Herwinanti, 2014) menemukan perangkapan fungsi pada sistem dan prosedur Persediaan BHP yang dapat melemahkan pengawasan. Pemisahan fungsi pada sistem dan prosedur Persediaan BHP merupakan cara yang digunakan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Persediaan BHP, sehingga pembakuan SOP pengelolaan BHP sangat diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan Persediaan BHP sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 35 Tahun 2012. Berdasarkan hasil observasi peneliti, Permasalahan yang dialami oleh Politeknik Negeri Bengkalis adalah belum adanya pembakuan SOP untuk pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP). Sementara pengelolaan BHP yang dilakukan sudah lintas gedung,

sehingga berakibat pada kekeliruan dan kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan. Oleh karena itu kebutuhan pembakuan SOP sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pengendalian dan integritas agar pemisahan fungsi pada sistem dan prosedur persediaan BHP dapat dilaksanakan yang merupakan cara untuk meningkatkan pengendalian intern (Herwinanti, 2014).

Pengelolaan Persediaan BHP di beberapa sektor, baik itu di sektor swasta maupun pemerintah memiliki penerapan pengelolaan BHP yang berbeda-beda. Sebagaimana dilaporkan oleh situs resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesia Pada 14 Juli 2020, KPKNL Padang sidimpuan mengadakan lelang online barang habis pakai bekas Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Mandailing Natal tahun 2019. Hasil lelang mencapai penjualan sebesar Rp118.789.987,- (369% dari harga limit). Proses lelang terdiri dari 4 peserta, dengan pemenang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi. Keputusan untuk melaksanakan lelang secara online mendapat apresiasi dari Sekretaris KPU Mandailing Natal karena dianggap lebih praktis, efisien, dan efektif dibandingkan dengan lelang manual. Ini menunjukkan adopsi teknologi dalam pengelolaan BHP yang memungkinkan proses yang lebih cepat dan transparan, serta memberikan hasil yang lebih menguntungkan.

Disisi lain, Syahiduz Zaman, seorang dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, menyuarakan pandangannya melalui Kompasiana bahwa pengelolaan barang di pemerintahan menjadi sorotan karena kompleksitas dan lambatnya prosedur jika dibandingkan dengan lembaga swasta. Beberapa contoh kasus seperti keterlambatan dalam perbaikan infrastruktur dan kesulitan dalam memperbaiki barang rusak. Birokrasi yang kompleks menjadi salah satu penyebab utama hambatan dalam pengelolaan barang, terutama dalam hal pengajuan usulan dan alokasi anggaran yang memakan waktu. Selain itu, masalah ini juga mencakup kecenderungan pemilihan barang yang langsung dianggap "habis pakai" tanpa pertimbangan opsi perbaikan. Pentingnya reformasi dalam kebijakan pengelolaan barang dan aset pemerintahan disorot sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Namun, beberapa instansi pemerintah telah menunjukkan langkah-langkah inovasi tentang kemudahan

integritas yang dianggap rumit di sektor pemerintah. Sebagai contoh, dilansir dari IAIN Parepare, Humas IAIN Parepare telah meluncurkan Aplikasi Persediaan Berbasis POS Terintegrasi e-commerce di Room Smart sebagai tindak lanjut dari proyek inovasi JF Tendik bagian keuangan. Inisiatif ini didukung oleh UPT TIPD dengan tujuan untuk mempermudah manajemen stok dan permintaan barang serta mendukung pembangunan zona integritas. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan barang di sektor pemerintahan.

Persediaan BHP memiliki peran yang krusial dalam mendukung operasional Perguruan Tinggi. BHP mencakup segala jenis material, peralatan, dan sumber daya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari di Perguruan Tinggi, seperti kertas, tinta printer, peralatan laboratorium, dan peralatan elektronik. Hal ini dikarenakan Perguruan Tinggi sebagai institusi pendidikan melibatkan berbagai macam proses dan cakupan kegiatan yang sangat beragam, mulai dari kegiatan kelas, praktikum laboratorium, hingga penyelenggaraan acara dan seminar. Semua kegiatan tersebut memerlukan dukungan BHP sebagai unsur pendukung utama. Sehingga keberadaan BHP menjadi landasan utama untuk kelancaran proses pembelajaran, penelitian, dan aktivitas administratif di lingkungan akademis (Fauziana, 2017).

Pengelolaan persediaan BHP yang efektif diperlukan agar kebutuhan Perguruan Tinggi dapat terpenuhi secara tepat waktu, mencegah kelangkaan atau pemborosan sumber daya, dan memastikan berlangsungnya operasional Perguruan Tinggi dengan efisiensi yang optimal. Dengan demikian, pilihan material, perawatan inventaris, dan perencanaan persediaan BHP menjadi aspek yang tidak bisa diabaikan. Pengelolaan yang baik terhadap BHP di Perguruan Tinggi tidak hanya berdampak pada kelancaran proses operasional, tetapi juga pada efisiensi pengeluaran dan keberlanjutan institusi dalam jangka panjang. Keterlambatan atau ketidaksesuaian perencanaan persediaan dapat menghambat operasional, seperti yang dijelaskan oleh Roza, Elfindri, & Almasdi (2020), hal ini dipengaruhi oleh kurangnya tenaga pengelola, dana yang tersedia belum mencukupi, serta kurangnya efektivitas pengawasan dan pembinaan. Pengelolaan Persediaan BHP yang baik dapat menjaga kelancaran dan kesinambungan kegiatan akademik. Dengan

pengelolaan persediaan yang baik, Perguruan Tinggi dapat memastikan bahwa Persediaan BHP yang dimiliki tersedia dalam kondisi baik dan sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak menghambat operasional Perguruan Tinggi.

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan salah satu Perguruan Tinggi yang memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang teknologi dan kejuruan. Politeknik Negeri Bengkalis merupakan satu-satunya Politeknik Negeri di Provinsi Riau yang beralamat di Jl. Bathin Alam, Desa Sungai Alam Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis, yang terdiri dari 3 Kampus yang tersebar di pulau Bengkalis. Politeknik Negeri Bengkalis memiliki 8 Jurusan yang terdiri dari 21 Progran Studi aktif yang terdaftar resmi di PDDKTI. Di sisi keuangan, Politeknik Negeri Bengkalis mendapat dukungan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Pada tahun 2023, Politeknik Negeri Bengkalis memperoleh pembiayaan persediaan BHP sebesar Rp2.840.678.000,-. Meskipun mendapatkan alokasi dana yang cukup besar, keterbatasan dana tetap menjadi perhatian. Dewi (2019) menyoroti bahwa kebutuhan barang sering kali melebihi dana yang tersedia, menunjukkan perlunya manajemen yang cermat dalam pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan barang. Pengelolaan persediaan BHP tidak hanya sebatas perencanaan dan pengadaan, tetapi juga melibatkan aspek penting seperti penggunaan yang efisien dan pemeliharaan yang terjadwal. Rosada dkk (2017) menegaskan bahwa pemeliharaan rutin yang tercatat dan terjadwal sangat penting sehingga dapat memberikan informasi mengenai riwayat barang, mulai dari pembelian, pemakaian, pemeliharaan, hingga habis masa pakai. Dengan demikian, pengelolaan persediaan BHP tidak hanya menjadi upaya pemenuhan kebutuhan, tetapi juga melibatkan strategi yang komprehensif untuk mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan dan pengelolaan sumber daya.

Sebagai lembaga Pendidikan yang aktif, Politeknik Negeri Bengkalis memiliki kebutuhan yang signifikan terkait BHP, pengelolaan BHP yang efektif dan efisien di Politeknik Negeri Bengkalis menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kelancaran dan kesinambungan kegiatan akademik dan administratif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan



Persediaan BHP di Politeknik Negeri Bengkalis sebagai studi kasus. Dengan melakukan penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi masalah dan upaya dalam pengelolaan Persediaan BHP serta mengusulkan solusi dan rekomendasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti di Politeknik Negeri Bengkalis dengan judul **“Pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Perguruan Tinggi Studi Kasus di Politeknik Negeri Bengkalis”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah jenis persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis?
2. Bagaimana pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis?
3. Apakah pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) pada Politeknik Negeri Bengkalis sesuai dengan regulasi yang berlaku?
4. Apa peran Politeknik Negeri Bengkalis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP)?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan Masalah dalam Penelitian ini hanya di lakukan pada Politeknik Negeri Bengkalis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan Persediaan Barang Habis Pakai yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis.

## **1.4 Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui jenis persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis

2. Untuk mengetahui pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis
3. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) pada Politeknik Negeri Bengkalis dengan standar yang berlaku
4. Untuk mengetahui peran Politeknik Negeri Bengkalis dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP)

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian mengenai pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan perbandingan bagi riset-riset selanjutnya terkait dengan penelitian pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis yang lebih sempurna yang dapat ditambahkan dengan variabel-variabel yang lain dan disempurnakan.
  - b. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis dalam bidang pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP). Dengan memperdalam pemahaman tentang aspek-aspek pengadaan, persediaan, penggunaan, pemeliharaan, dan pelaporan, penelitian ini dapat membantu memperkaya teori-teori administrasi yang ada.
  - c. Hasil penelitian ini dapat menghasilkan konsep-konsep baru dan model-model pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) yang dapat diterapkan di Perguruan Tinggi lain atau institusi serupa. Melalui identifikasi praktik terbaik dan penemuan baru, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru tentang pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di lingkungan Akademik.
  - d. Dengan mempelajari pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis, penelitian ini dapat mengidentifikasi area-area di mana proses pengelolaan dapat ditingkatkan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan

praktis bagi Perguruan Tinggi dan institusi sejenis dalam mengoptimalkan pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) mereka.

- e. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konteks khusus pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis. Hal ini dapat mencakup faktor-faktor unik yang mempengaruhi pengelolaan persediaan BHP di lingkungan Perguruan Tinggi, seperti kebijakan internal, struktur organisasi, dan karakteristik penggunaan Barang Habis Pakai (BHP) dalam kegiatan akademik.
- f. Hasil penelitian diharapkan ini dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk meningkatkan pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di Politeknik Negeri Bengkalis dan Perguruan Tinggi secara umum. Berdasarkan temuan penelitian, dapat diajukan rekomendasi konkret untuk memperbaiki prosedur administrasi, mengoptimalkan penggunaan bahan, mengurangi pemborosan, meningkatkan pelaporan, dan meningkatkan keberlanjutan pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP).

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi peneliti

Untuk menambah pengetahuan peneliti dan dapat dijadikan sebagai pendorong dalam pengetahuan untuk pengembangan ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) yang baik sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### b. Bagi peneliti lain

Untuk selanjutnya hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini diharapkan dapat memberikan dukungan serta manfaat lebih di lapangan terhadap teori-teori terkait masalah penelitian yang akan memberikan pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan pengan pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) di lingkungan Perguruan Tinggi.

- c. Bagi Politeknik Negeri Bengkalis  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan guna mengevaluasi pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP).
- d. Bagi Akademis  
Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, pengalaman dan penerapan teori yang ada terutama mengenai pengelolaan persediaan Barang Habis Pakai (BHP) sebagai bahan evaluasi dalam menerapkan Standar Operasional Prosedur. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi studi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Sarjana Terapan Akuntansi Keuangan Publik maupun mahasiswa yang lainnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam pembahasan ini, sistematika tertulis dari 5 (Lima) bab yang masing-masing diuraikan sebagai berikut:

### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

### **BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tinjauan pustaka dan penjelasan landasan teori pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

### **BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengambilan sampel, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian dan definisi konsep dan operasional.

**BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA**

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

**BAB 5 : PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**